

Sistem Pemilu dan Pembentukan Koalisi Minoritas Study Kasus Malaysia (Anwar Ibrahim)

Shofi Dwi Syifa Faujiah¹, Nurdin²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok, Indonesia
Email: shofidsf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika politik di Malaysia dengan fokus pada sistem pemilu dan pembentukan koalisi multi-etnis pasca Pemilihan Umum ke-15 tahun 2022. Malaysia menerapkan demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional, di mana pemilu diselenggarakan menggunakan sistem "First Past the Post" (FPTP). Pemilu 2022 menghasilkan parlemen gantung, yang menandai pergeseran signifikan dari dominasi koalisi tunggal menuju era baru politik koalisi. Anwar Ibrahim berhasil membentuk koalisi pemerintahan multi-etnis, yang disebut Kabinet Persatuan Nasional, meskipun menghadapi tantangan perbedaan ideologi dan keberagaman etnis di dalam koalisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan inklusif Anwar Ibrahim serta peran negosiasi politik dan pembentukan koalisi dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, Pendekatan ini berfokus pada deskripsi dan interpretasi fenomena melalui pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis, menekankan kekayaan informasi tekstual. Hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas sistem pemilu Malaysia dan dampaknya terhadap stabilitas politik negara.

Kata Kunci: Anwar Ibrahim, sistem pemilu, First Past the Post, koalisi multi-etnis, dinamika politik, Kabinet Persatuan Nasional

Abstract

This study examines the political dynamics in Malaysia with a focus on the electoral system and the formation of multi-ethnic coalitions after the 15th General Election in 2022. Malaysia implements a parliamentary democracy with a constitutional monarchy, where elections are held using the "First Past the Post" (FPTP) system. The 2022 election resulted in a hanging parliament, which marked a significant shift from single-coalition dominance to a new era of coalition politics. Anwar Ibrahim managed to form a multi-ethnic governing coalition, called the National Unity Cabinet, despite facing challenges of ideological differences and ethnic diversity within the coalition. This study aims to analyze Anwar Ibrahim's inclusive leadership as well as the role of political negotiations and coalition formation in maintaining government stability. This research uses a descriptive Qualitative Method, This approach focuses on the description and interpretation of phenomena through qualitative data collection and analysis techniques, emphasizing the wealth of textual information. The results of this study highlight the complexity of Malaysia's electoral system and its impact on the country's political stability.

Keywords: Anwar Ibrahim, electoral system, First Past the Post, multi-ethnic coalition, political dynamics, National Unity Cabinet

Pendahuluan

Malaysia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parleментар dan Monarki Konstitusional yang dipimpin oleh raja yang di tuankan agung sebagai kepala negara, lalu kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana menteri, dan menganut sistem pemilihan umum *first past the post* yang merupakan sistem di mana pemilih memilih satu kandidat di satu wilayah pemilihan, dan kandidat dengan jumlah suara terbanyak memenangkan kursi tersebut (Besar, 2017). Pemilihan Umum di Malaysia sudah dilaksanakan 15 kali sejak tahun 1959-2022.

Pemilihan Umum 1959 di Malaysia menandai tonggak penting dalam evolusi politik dan konstitusional negara itu. Pemilu ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas menuju dekolonisasi dan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial, yang mencerminkan perubahan sentimen pasca-Perang Dunia II (Nadzri, 2018). Pemilu di Malaysia telah menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi, dengan sejarah sejak pra-kemerdekaan Malaysia pada tahun 1955, lalu setelah Malaysia merdeka pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1959. Pemilu 1959 mencerminkan perubahan sentimen dan aspirasi rakyat di wilayah tersebut, menyiapkan panggung untuk perkembangan politik lebih lanjut dan akhirnya gerakan kemerdekaan di Malaysia.

Pemilihan Umum di Malaysia secara historis didominasi oleh partai-partai seperti UMNO dan sekutunya dalam koalisi Barisan Nasional, mendapatkan dukungan besar-besaran dari komunitas Melayu di Malaysia. UMNO dan Koalisi Barisan Nasionalnya telah menguasai Pemilihan umum Malaysia sejak 1974, dan mendominasi selama 6 dekade (Funston, 2018). Pemilihan Umum ke-14 di Malaysia menandai perubahan signifikan dalam politik, mengakhiri dominasi lama yaitu UMNO dan Barisan Nasional dari koalisi tunggal dan memulai periode perubahan aliansi (Moten, 2023).

Pemilihan umum Malaysia ke-14 pada tahun 2018 menandai perubahan politik yang signifikan, yang mengarah pada pembentukan koalisi Pakatan Harapan, menggantikan pemerintahan Barisan Nasional (Ng et al., 2021). Peristiwa bersejarah ini menyaksikan kebangkitan Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim sebagai pemain kunci, di samping kembalinya Mahathir Mohamad ke politik, membentuk Koalisi yang menantang dominasi UMNO yang telah lama berdiri (Pogadaev, 2023);(Fatayati, 2017). Pada Pemilihan Umum 14 ini dengan kemenangan koalisi Pakatan Harapan ini, Mahathir Mohamad kembali lagi menduduki kursi perdana menteri Malaysia dengan usia 92 tahun menjadi pemimpin yang dipilih tertua didunia (Chin, 2018). Hasil pemilu mencerminkan reaksi beragam di antara penduduk Malaysia, menunjukkan pergeseran persepsi terhadap kepemimpinan politik dan arah.

Pada 2020 Koalisi Pakatan Harapan ini muncul gejolak ketika Mahathir Mohamad mundur dari kursi perdana menteri, lalu menimbulkan gejolak transisi kekuasaan pada krisis politik dan Krisis Politik ini biasanya di sebut dengan “*Sheraton Move*”(Saidin, 2023). Setelah itu, koalisi Pakatan Harapan pecah, yang mengarah pada pembentukan pemerintahan Aliansi Nasional (Perikatan Nasional, PN) di bawah kepemimpinan Muhyiddin Yassin (Tayeb, 2021). Koalisi Pemerintahan Persikatan Nasional merupakan

gabungan Barisan Nasional (BN), Gabungan Partai Sarawak (GPS), Partai Bersatu Sabah (PBS), dan anggota parlemen dari fraksi Independen.

Pada Agustus 2021 krisis politik masih berlanjut dengan Pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin terjadi pada Agustus 2021 di tengah latar belakang gejolak politik dan pandemi COVID-19. Pemerintahan Muhyiddin menghadapi kritik karena pengelolaan krisis kesehatan yang kontroversial, yang menyebabkan pengunduran dirinya dan penggantian berikutnya oleh Ismail Sabri Yaakob (Talib, 2023). Lanskap politik di Malaysia mengalami perubahan signifikan menyusul pengunduran diri Mahathir Mohamad pada Februari 2020, yang akhirnya menyebabkan Muhyiddin Yassin mengambil peran Perdana Menteri. Pengunduran diri Muhyiddin Yassin menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam lingkup politik Malaysia, yang mencerminkan interaksi kompleks antara dinamika kekuasaan dan transisi demokrasi dalam Fase kritis politik ini. Raja Malaysia memiliki peran vital untuk menjaga stabilitas negara Malaysia (Tan & Al-Rikaby, 2022);(Rahmatunnisa, 2017).

Pada Pemilihan Umum Ke 15 Malaysia yang dilaksanakan pada november 2022 di menangkan oleh koalisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim yaitu Koalisi Pakatan Harapan. Hasil pemilihan umum tersebut menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara beberapa koalisi dan partai politik utama di Malaysia. Pakatan Harapan, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, berhasil meraih 82 kursi, sementara Perikatan Nasional yang didukung oleh Muhyiddin Yassin memperoleh 73 kursi. Koalisi Barisan Nasional di bawah kepemimpinan Ismail Sabri Yaakob mendapatkan 30 kursi, sementara Gabungan Parti Sarawak (GPS) berhasil meraih 22 kursi.

Malaysia mengalami parlemen yang digantung setelah Pemilihan Umum ke-15 pada tahun 2022, ini merupakan pertama kali dalam sejarah Malaysia, Hal ini disebabkan oleh ketiadaan satu partai politik atau koalisi partai yang memperoleh jumlah kursi mayoritas mutlak di parlemen. Dengan tidak adanya satu partai politik tunggal atau koalisi yang memperoleh mayoritas absolut dalam parlemen, hasil pemilihan umum tersebut menunjukkan bahwa politik Malaysia saat ini memasuki periode di mana negosiasi dan pembentukan koalisi akan menjadi kunci dalam pembentukan pemerintahan yang stabil. Dalam situasi seperti ini, partai politik dan koalisi cenderung mencari aliansi dan kesepakatan untuk membentuk mayoritas parlemen.

Pada Pemilihan umum ini menandai pergeseran signifikan dalam aliansi dan berakhirnya dominasi lama dari satu koalisi tunggal, yang mengarah pada ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung. Raja Malaysia Abdullah yang sebagai kepala negara Malaysia mempunyai peranan yang besar dalam proses untuk proses percepatan penyelesaian Pemilihan umum 15. Meskipun peran raja di Malaysia cenderung bersifat seremonial, namun dia memiliki kewenangan untuk menunjuk individu yang diyakininya mendapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai perdana menteri.

Pada Akhirnya Anwar Ibrahim telah berhasil membentuk koalisi pemerintahan di Malaysia setelah Pemilihan Umum 2022. Koalisinya termasuk mitra dari Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Partai lainnya dan Anggota Parlemen Independen. Pemerintahan

yang dibentuk oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dinamakan dengan Kabinet Persatuan Nasional atau Perpaduan Nasional. Di dalam koalisi pemerintahan Anwar Ibrahim, terdapat berbagai tantangan internal yang muncul akibat perbedaan ideologi antara partai politik yang terlibat, serta keberagaman etnis di Malaysia, termasuk mayoritas pribumi dan non-pribumi.

Perbedaan ideologi antara partai-partai politik dalam koalisi dapat menciptakan gesekan dan ketegangan, karena masing-masing partai mungkin memiliki agenda dan visi yang berbeda dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan pemerintahan. Selain itu, keberagaman etnis yang mencakup mayoritas pribumi dan minoritas non-pribumi juga dapat menjadi sumber ketegangan dalam pembentukan kebijakan yang mencerminkan kepentingan beragam masyarakat Malaysia.

Anwar Ibrahim dikenal sebagai tokoh yang menganut pandangan inklusif dan plural, ia memimpin dalam pembentukan partai politik yang mencakup beragam etnis dan ras, yakni Partai Keadilan Nasional. Partai tersebut kemudian menyatu dengan Parti Rakyat Malaysia pada Agustus 2003, membentuk Parti Keadilan Rakyat (PKR). Keterbukaannya terhadap keragaman tercermin dalam keputusannya untuk menggabungkan partai minoritas, Partai Tindakan Demokratik, sebuah partai sekuler dengan dukungan utama dari kalangan urban dan non-Muslim. Lalu Pada Pemerintah Anwar Ibrahim ini, hadirnya koalisi Barisan Nasional, yang di dipimpin oleh UMNO yang memiliki ideologi yang nasionalis agamis, pada dulu UMNO dan Partai Tindakan Demokratik ini sering berlawanan ideologi. Oleh karena itu, kepemimpinan Anwar Ibrahim dalam mengelola keragaman ideologi dan etnis dalam koalisi menjadi krusial. Dibutuhkan pendekatan yang inklusif dan kompromi yang bijaksana untuk menavigasi tantangan-tantangan tersebut dan menjaga stabilitas koalisi serta kohesi pemerintahan. Upaya untuk membangun kesepakatan bersama dan memperkuat dialog antar partai akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam pemerintahan yang efektif dan inklusif di Malaysia.

Pada Penelitian ini penulis merujuk pada literatur Moten yang membahas Pemilihan Umum ke-15 Malaysia: parlemen digantung, ketidakstabilan politik koalisi dan Pergeseran bersejarah dari dominasi koalisi tunggal ke aliansi yang bergeser (Moten, 2023). Pada Penelitian yang membahas terkait Koalisi Multi-Etnik Di Bosnia dan Herzegovina pasca-Dayton, koalisi pemerintahan multi-etnis dibentuk antara partai-partaian moderat dan garis keras berdasarkan kekuatan elektoral, tidak selalu bertujuan untuk kesesuaian (Vukojević, 2023). Penelitian lainnya membahas sistem pemilu malaysia dengan metode *First Past The Post* (FPTP) dalam sistem pemilu Federasi Malaya (PTM) antara tahun 1948-1959 (Rus et al., 2021).

Kebaruan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Anwar Ibrahim menjalankan pemerintahan secara inklusif. Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana melihat sistem pemilu di malaysia secara keseluruhan dan melihat dengan bagaimana Anwar Ibrahim mengorkestrasi pemerintahan yang terdiri dari Multi Etnis.

Rumusan penelitian berdasarkan pada permasalahan penelitian yang tertulis dalam latar belakang penelitian yakni : Bagaimana dinamika politik Malaysia, sistem

pemilihan umum, dan pembentukan pemerintahan pasca-Pemilihan Umum ke-15 tahun 2022, khususnya dalam konteks pembentukan koalisi pemerintahan multi-etnis di Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim?"

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik Malaysia, sistem pemilihan umum, dan pembentukan pemerintahan pasca-Pemilihan Umum ke-15 tahun 2022. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Anwar Ibrahim mengorkestrasi pemerintahan yang terdiri dari Multi Etnis. Hipotesis sementara dari penelitian ini adalah bahwa Anwar Ibrahim berhasil membentuk koalisi pemerintahan yang inklusif, berlandaskan visi "Malaysia Madani," dan bahwa upaya untuk membangun kesepakatan bersama dan memperkuat dialog antar partai akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam pemerintahan yang efektif dan inklusif di Malaysia.

Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, Pendekatan ini berfokus pada deskripsi dan interpretasi fenomena melalui pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis, menekankan kekayaan informasi tekstual. Metode deskriptif kualitatif, menurut Sugiono (2009), berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi terkait sistem pemilu di Malaysia, lalu hal yang berkaitan dengan Kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia ke 10 Anwar Ibrahim dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemilu Di Malaysia

Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Malaysia memiliki sistem politik multipartai di mana pemerintah federal atau negara bagian dapat dibentuk oleh partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negara. Keberadaan partai politik memainkan peran penting dalam pendidikan politik Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa partai politik di Malaysia memiliki peran dan fungsi sebagai representatif dan ekspresif, seperti mengembangkan dan menyebarkan isu-isu populer, menghubungkan partisipasi dan kompetisi yang terstruktur, serta memegang posisi pemerintahan untuk kesejahteraan faksi dan masyarakat luas

Penyelenggara Pemilu di Malaysia Berdasarkan Pasal 114 Persekutuan Kelembagaan, komisi pemilihan umum disebut Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Komisi ini didirikan pada tanggal 4 September 1957. Pada saat pembentukannya, SPR terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota. YBhg. Dato' Dr. Mustafa Albakri bin Haji Hassan adalah Ketua Komisi yang pertama. Bapak Lee Ewe Boon dan Bapak Ditt Singh termasuk

di antara para anggota. Jumlah anggota komite bertambah menjadi tiga orang setelah Malaysia diproklamasikan pada tahun 1963.

Secara bergilir, anggota tambahan dari Sabah atau Sarawak ditunjuk. Pilihan rakyat Suruhanjaya memiliki wewenang untuk menegakkan, mengawasi, dan melestarikan proses demokrasi negara melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. SPR dilindungi oleh hukum Malaysia, yaitu Undang-Undang Pemilu 1957, selain diatur oleh Konstitusi (Undang-Undang 31). Anggota SPR diberikan insentif, tunjangan, dan perlindungan di bawah peraturan ini, serta hukuman untuk pelanggaran SPR dan masalah lainnya. Jika suatu tindakan atau gugatan dilancarkan terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum atas tindakan yang dilakukan atau kelalaian dari tindakannya, anggota tersebut menerima perlindungan dan tunjangan. Undang-undang ini mengundang seorang hakim untuk bertindak dalam melaksanakan kewajibannya ketika melakukan tugasnya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Malaysia mengikuti sistem parlementer di mana partai-partai membentuk koalisi sebelum pemilihan umum (Weiss, 2015). Konstitusi Federasi Malaysia, sebagaimana dinyatakan dalam Bab 4 tentang Badan Legislatif Federal, merupakan dasar hukum utama untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam Konstitusi Federasi Malaysia, pemilihan umum diberikan bagian tersendiri, yaitu Bagian VIII tentang Pemilihan Umum Raya, yang memiliki delapan pasal mulai dari Pasal 113 hingga Pasal 120. Berikut ini adalah beberapa aturan lain yang harus ditaati 1) Undang-Undang Pemilihan Umum Malaysia tahun 1958; 2) Undang-Undang Pelanggaran Pemilihan Umum Malaysia tahun 1954; 3) Peraturan Pemilihan Umum (Pendaftaran Pemilih) P.U.(A) 293/2002, yang terakhir kali diubah oleh P. U.(A) 106/2012; 4) P.U.(A) 185/2003 Peraturan Pemilihan Umum (Pemilihan via Pos) 2003; 4) P.U.(A) 386/1981 Peraturan Pemilihan Umum (Penyelenggaraan Pemilihan Umum) 1981, terakhir diubah dengan P.U.(A) 134/2013.

Konstitusi Federal Malaysia (FC) membentuk Parlemen dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, serta Majelis Legislatif Negara Bagian di setiap negara bagian. Para pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara setiap lima tahun sekali (Pasal 55(3), FC) untuk memilih anggota Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional (pasal 55(4), FC) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat negara bagian (pasal 71, Jadwal 8, ayat 9(3), FC). Partai dengan kursi terbanyak dalam pemilihan dinyatakan sebagai pemenang dan membentuk pemerintahan.

Sistem Pemilu Di Malaysia

Di Malaysia, pemilihan umum diselenggarakan dengan menggunakan metode "*first past the post* (FPTP)", yang melibatkan banyak pemenang. Metode FPTP, yang sering dikenal sebagai sistem kemenangan mayoritas, dilaksanakan dengan cara para pemegang hak suara menggunakan surat suara untuk menggunakan hak pilih mereka. *First Past The Post* (FPTP) adalah sistem pemilihan calon di mana calon yang memperoleh sebagian besar dianggap sebagai pemenang, tanpa memerlukan mayoritas mutlak. Pemenang pemilihan umum adalah kandidat yang mendapatkan suara mayoritas atau suara terbanyak.

First Past The Post (FPTP) adalah sistem pemilihan yang signifikan dalam lanskap politik Malaysia. Secara historis, FPTP diperkenalkan di Wilayah Federal Malaya pada tahun 1954, bertujuan untuk membangun dominasi Melayu dalam proses pemilihan (Rus et. al, 2022). Pada tahun 2022, Malaysia menghadapi skenario politik unik di mana tidak ada satu parpol pun yang mendapatkan mayoritas sederhana dalam Pemilihan Umum, yang mengarah pada pembentukan Pemerintah Persatuan yang terdiri dari berbagai parpol.

Malaysia adalah negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer di mana perdana menteri dan menteri-menteri lainnya dipilih oleh publik setiap lima tahun sekali. Partai politik adalah bagian penting dari kehidupan politik di Malaysia. Malaysia menggunakan Sistem Pemilihan Distrik berdasarkan lokasi pemilihan daerah, lalu sistem pemilihan umum di Malaysia dicirikan menggunakan konsep multi-partai. Dalam pelaksanaannya Partai politik di Malaysia harus membentuk koalisi tetap sebelum dilaksanakan pemilihan umum di Malaysia, Koalisi tetap ini bertujuan untuk memperoleh suara mayoritas pada pemilihan umum di Malaysia dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi Partai Politik Di Pemilihan Umum Ke 15 2022

Berbagai parpol dan koalisi terlibat dalam Pemilihan Umum ke-15 Malaysia, dengan total 945 kandidat dari enam koalisi utama partai yang bersaing memperebutkan 222 kursi di parlemen.

Pakatan Nasional

| Bendera Partai | Nama Partai | Ideologi | Posisi | Ketua | Kursi Kontestasi | Hasil 2022 | | Kursi sekarang |
|---|--|---|-------------|------------------------|------------------|------------|----------|----------------|
| | | | | | | Suara (%) | Kursi | Komposisi |
| Partai anggota | | | | | | | | |
|  | PKR Partai Keadilan Rakyat | Liberalisme sosial Demokrasi liberal | Tengah-kiri | Anwar Ibrahim | 102 | 15.74% | 31 / 222 | 31 / 81 |
|  | DAP Partai Tindakan Demokratik | Demokrasi sosial Demokrasi liberal | Tengah-kiri | Anthony Loke Siew Fook | 55 | 15.61% | 40 / 222 | 40 / 81 |
|  | AMANAH Partai Amanah Negara | Progresifme Islamisme modern | Tengah-kiri | Mohamad Sabu | 54 | 5.70% | 8 / 222 | 8 / 81 |
|  | UPKO Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu | Hak bangsa Sabah | N/A | Ewon Benedick | 5 | 0.47% | 2 / 222 | 2 / 81 |

Gambar tabel 1 Partai Anggota Koalisi Pakatan Harapan (Sumber Wikipedia)

Perserikatan Nasional

| Logo | Nama | Posisi politik | Pemimpin | Kursi diperebutkan | Hasil 2022 | | Kursi saat ini |
|---|---|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------------|
| | | | | | Pemilihan (%) | Kursi | Komposisi |
| Anggota Partai | | | | | | | |
|  | BERSATU Partai Pribumi Bersatu Malaysia | Tengah ke kanan tengah | Muhyiddin Yassin | 87 | 5.95% | 31 / 222 | 31 / 74 |
|  | PAS Partai Islam Se-Malaysia | Sayap kanan | Abdul Hadi Awang | 61 | 16.82% | 43 / 222 | 43 / 74 |
|  | GERAKAN Partai Gerakan Rakyat Malaysia | Kanan tengah | Dominic Lau Hoe Chai | 23 | 1.07% | 0 / 222 | 0 / 74 |
|  | SAPP Partai Progresif Sabah | Tengah | Yong Teck Lee | 1 | 0.03% | 0 / 222 | 0 / 74 |

Gambar tabel 2 Partai Anggota Koalisi Pekatan Harapan (Sumber Wikipedia)

Barisan Nasional

| Logo | Name | Ideology | Position | Leader(s) | Seats contested | 2022 result | | Current seats |
|---|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| | | | | | | Votes (%) | Seats | Composition |
| Member parties | | | | | | | | |
|  | UMNO United Malays National Organisation <i>Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu</i> | Ketuanan Melayu | Centre-right | Ahmad Zahid Hamidi | 119 | 16.43% | 26 / 222 | 26 / 30 |
|  | MCA Malaysian Chinese Association <i>Persatuan Cina Malaysia</i> | Chinese interests | | Wee Ka Siong | 44 | 4.29% | 2 / 222 | 2 / 30 |
|  | MIC Malaysian Indian Congress <i>Kongres India Malaysia</i> | Dravidian movement | | Vigneswaran Sanasee | 10 | 1.11% | 1 / 222 | 1 / 30 |
|  | PBRS United Sabah People's Party <i>Parti Bersatu Rakyat Sabah</i> | Sabah nationalism | | Arthur Joseph Kurup | 2 | 0.15% | 1 / 222 | 1 / 30 |

Gambar tabel 3 Partai Anggota Koalisi Barisan Nasional (Sumber Wikipedia)

Gabungan Partai Serawak (GPS)

| Logo | Name | Ideology | Leader(s) | Seats contested | 2022 result | | Sarawak seats only |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | Votes (%) | Seats | Composition |
|  | PBB United Bumiputera Heritage Party <i>Parti Pesaka Bumiputera Bersatu</i> | Sarawak nationalism | Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg | 14 | 2.22% | 14 / 222 | 14 / 23 |
|  | SUPP Sarawak United Peoples' Party <i>Parti Rakyat Bersatu Sarawak</i> | Sarawakian regionalist Syncretic politics and centrism | Sim Kui Hian | 7 | 1.08% | 2 / 222 | 2 / 23 |
|  | PRS Sarawak Peoples' Party <i>Parti Rakyat Sarawak</i> | Sarawak nationalism | Joseph Salang Gandum | 6 | 0.44% | 5 / 222 | 5 / 23 |
|  | PDP Progressive Democratic Party <i>Parti Demokratik Progresif</i> | Regionalism | Tiong King Sing | 4 | 0.54% | 2 / 222 | 2 / 23 |

Gambar tabel 4 Partai Anggota Koalisi Gabungan Partai Serawak (Sumber Wikipedia)

Gabungan Rakyat Sabah (GPS)

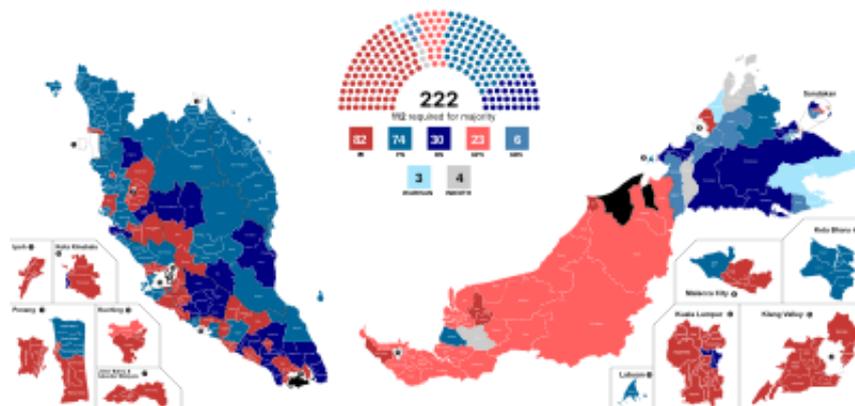
| Logo | Name | Ideology | Sabah leader(s) | Seats contested | 2022 result | | |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------|---------|
| | | | | | Votes (%) | Seats | |
| Member parties | | | | | | | |
|  | GRS | Sabah People's Coalition (Direct members) <i>Keahlian terus Gabungan Rakyat Sabah</i> ^[32] | Sabah regionalism | Armizan Mohd. Ali | 6 | 0.61% | 4 / 222 |
|  | GAGASAN | Sabah People's Ideas Party <i>Parti Gagasan Rakyat Sabah</i> ^[33] | | Hajiji Noor | 0 | 0.00% | 0 / 222 |
|  | PBS | United Sabah Party <i>Parti Bersatu Sabah</i> ^[34] | | Maximus Johnity Ongkili | 4 | 0.42% | 1 / 222 |
|  | SAPP | Sabah Progressive Party <i>Parti Maju Sabah</i> ^[35] | | Yong Teck Lee | 1 | 0.03% | 0 / 222 |
|  | STAR | Homeland Solidarity Party <i>Parti Solidariti Tanah Airku</i> ^[36] | | Jeffrey Kitingan | 2 | 0.19% | 1 / 222 |
|  | USNO | United Sabah National Organisation (New) <i>Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (Baru)</i> ^[37] | | Pandikar Amin Mulia | 0 | 0% | 0 / 222 |
|  | PHRS | Sabah People's Hope Party <i>Parti Harapan Rakyat Sabah</i> ^[38] | | Liew Yun Fah | 0 | 0% | 0 / 222 |
|  | LDP | Liberal Democratic Party <i>Parti Liberal Demokratik</i> ^{[39][40]} | | Chin Su Phin | 0 | 0% | 0 / 222 |

Gambar tabel 5 Partai Anggota Koalisi Gabungan Rakyat Sabah (Sumber Wikipedia)

Partai Warisan

Partai Warisan adalah partai politik di Malaysia, Partai ini dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2016 dan didirikan oleh Ignatius Darell Leiking dan Shafie Apdal Partai ini sebelumnya bernama Parti Pembangunan Warisan Sabah. Pada Pemilihan Umum Malaysia Ke 15 ini Partai memiliki 3 Kursi Anggota Parlemen.

Peta Sebaran Pemilohan Umum ke 15 2022 di Malaysia



Gambar tabel 6 Peta Sebaran Pemilohan Umum ke 15 2022 di Malaysia (Sumber Wikipedia)

Pembentukan Pemerintahan Malaysia

Pembentukan Pemerintahan di Malaysia harus memiliki mayoritas suara di parlemennya Minimal 112 anggota parlemen yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan dari 222 anggota parlemen. Pada Pemilihan Umum ke-15 Malaysia pada tahun 2022, parlemen gantung terjadi ketika tidak ada partai politik yang memperoleh mayoritas mutlak kursi di Dewan Rakyat. Situasi ini seringkali memunculkan kebutuhan untuk pembicaraan dan negosiasi antara partai-partai politik untuk membentuk koalisi atau mencapai kesepakatan bagi pembentukan pemerintahan yang stabil.

Dalam konteks Malaysia, ini berarti bahwa partai atau koalisi partai harus mencari dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan yang efektif. Proses ini bisa melibatkan negosiasi politik yang panjang dan kadang-kadang kontroversial, terutama jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan politik antara partai-partai yang terlibat. Selama periode parlemen gantung, biasanya terjadi ketegangan politik dan spekulasi mengenai hasil negosiasi antara partai-partai politik yang bersaing. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pemilihan ulang dapat diadakan jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, atau jika kesepakatan yang telah dicapai tidak mempertahankan dukungan mayoritas dalam jangka panjang.

Ketika parlemen gantung terjadi setelah Pemilihan Umum ke-15 di Malaysia, peran Raja Abdullah sebagai kepala negara memang sangat penting dalam upaya percepatan penyelesaian krisis politik yang mungkin timbul. Meskipun peran Raja dalam sistem politik Malaysia umumnya bersifat seremonial, kekuasaan konstitusionalnya tetap memberikan kewenangan penting dalam situasi seperti ini.

Salah satu kewenangan utama Raja adalah dalam menunjuk perdana menteri. Dalam situasi di mana tidak ada partai yang memperoleh mayoritas mutlak di parlemen, Raja memiliki keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggapnya perlu untuk menyelesaikan krisis politik, termasuk menunjuk individu yang diyakininya dapat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.

Proses penunjukan perdana menteri oleh Raja biasanya didasarkan pada konsultasi yang cermat dengan pemimpin politik utama dan pertimbangan atas stabilitas politik dan kepentingan nasional. Meskipun keputusan Raja dalam hal ini bisa dipengaruhi oleh saran dan tekanan dari berbagai pihak, pada akhirnya keputusan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang bijaksana dan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Dengan demikian, peran Raja Abdullah dalam proses percepatan penyelesaian Pemilihan Umum ke-15 di Malaysia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

Pada Akhirnya Anwar Ibrahim Berhasil membentuk koalisi pemerintahan yang disebut Kabinet Persatuan Nasional atau Perpaduan Nasional di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim merupakan langkah penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas politik di Malaysia setelah Pemilihan Umum 2022. Dengan melibatkan mitra dari berbagai spektrum politik, termasuk Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Partai Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, partai lainnya, dan anggota parlemen

independen, Anwar Ibrahim berusaha untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.

Namun, mengelola koalisi semacam itu tidaklah mudah. Tantangan internal seringkali muncul akibat perbedaan ideologi antara partai politik yang terlibat. Setiap partai memiliki agenda, kebijakan, dan kepentingan yang berbeda, yang dapat menyulitkan proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keberagaman etnis di Malaysia, termasuk antara mayoritas pribumi dan non-pribumi, juga bisa menjadi sumber gesekan dalam koalisi tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Anwar Ibrahim dan para pemimpin koalisi perlu mempromosikan dialog, negosiasi, dan kompromi yang konstruktif. Mereka harus berusaha untuk membangun kesepahaman dan kerjasama di antara anggota koalisi, sambil tetap memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, menjaga stabilitas dan keberlanjutan Kabinet Persatuan Nasional akan menjadi tugas yang menantang, namun sangat penting bagi pemerintahan Anwar Ibrahim dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus negara dengan efektif.

Konsep Malaysia Madani dalam Pemerintahan Anwar Ibrahim

Ideologi "Malaysia Madani" adalah konsep yang diusung oleh Anwar Ibrahim dan merupakan salah satu pilar dalam platform politiknya. Istilah "madani" berasal dari bahasa Arab yang berarti "sipil" atau "peradaban". Konsep ini mengusung gagasan tentang sebuah Malaysia yang beradab, inklusif, dan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan harmoni antar etnis dan agama. Dalam konteks Malaysia, konsep "Malaysia Madani" menekankan pentingnya membangun sebuah negara yang menghargai keberagaman etnis, agama, dan budaya. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, keadilan sosial, kesetaraan, serta harmoni antar-etnis dan agama.

Visi "Malaysia Madani" menekankan bahwa semua warga Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, harus memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat dan dihargai secara merata. Ini mencakup aspek-aspek seperti partisipasi politik, akses terhadap layanan publik, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempromosikan ideologi "Malaysia Madani", Anwar Ibrahim dan para pendukungnya berharap untuk menciptakan sebuah negara yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ini adalah konsep yang bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan Malaysia sebagai sebuah bangsa yang majemuk dan beradab.

Dalam konteks pemerintahan Anwar Ibrahim, ideologi "Malaysia Madani" diharapkan untuk menggambarkan visi negara yang berpandangan ke depan, di mana setiap warga Malaysia, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama dan dihargai secara merata dalam masyarakat.

Beberapa aspek dari ideologi "Malaysia Madani" yang mungkin diimplementasikan dalam pemerintahan Anwar Ibrahim termasuk: Demokrasi yang Berfungsi: Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, memperkuat

institusi-institusi demokrasi, dan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Keadilan dan Kesetaraan: Menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga Malaysia, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. **Pluralisme dan Inklusivitas:** Mempromosikan keharmonisan antar-etnis dan antar-agama, menghormati dan memperkaya keragaman budaya dan agama yang ada di Malaysia, serta mendorong dialog antarbudaya dan kerjasama antaragama.

Pembangunan Berkelanjutan: Menerapkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mengutamakan inovasi dan teknologi, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dalam implementasinya, ideologi "Malaysia Madani" dapat menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Anwar Ibrahim, serta sebagai visi untuk memandu arah pembangunan Malaysia menuju masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi ideologi ini bisa menjadi tantangan, terutama mengingat keragaman politik, sosial, dan budaya yang ada di Malaysia.

Kesimpulan

Pembentukan koalisi pemerintahan multi-etnis di Malaysia, dengan fokus pada kepemimpinan Anwar Ibrahim. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dinamika politik Malaysia, sistem pemilihan umum, dan pembentukan pemerintahan pasca-Pemilihan Umum ke-15 tahun 2022. Malaysia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan monarki konstitusional, menunjukkan kompleksitas dalam dinamika politiknya.

Hasil penelitian menyoroti peran penting partai politik, sistem pemilihan umum, serta tantangan dan perubahan politik yang terjadi dalam pembentukan koalisi pemerintahan multi-etnis. Khususnya, kepemimpinan Anwar Ibrahim dalam membentuk koalisi pemerintahan yang inklusif, berlandaskan visi "Malaysia Madani," menjadi fokus utama dalam analisis ini. Implikasi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan juga dibahas sebagai bagian dari penelitian ini.

BIBLIOGRAFI

- Besar, J. A. (2017). Trend pengundian dalam pilihan raya umum malaysia ke-13. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 12(2), 126–149. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.625005>.
- Chin, J. (2018). The comeback kid: Mahathir and the 2018 Malaysian general elections. *The Round Table*, 107(4), 535–537. <https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1494692>
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–163.
- Funston, J. (2018). Malaysia's 14th General Election (GE14)-The Contest for the Malay Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(3), 57–83.

- <https://doi.org/10.1177/186810341803700304>
- Moten, A. R. (2023). Research Note: The 15th General Elections in Malaysia. *Contemporary Southeast Asia*, 45(1), 111–127.
- Nadzri, M. M. N. (2018). The 14th General Election, the fall of Barisan Nasional, and political development in Malaysia, 1957-2018. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(3), 139–171. <https://doi.org/10.1177/186810341803700307>
- Ng, J. W. J., Rangel, G. J., & Phung, Y. C. (2021). Malaysia's 14th General Election: dissecting the 'Malaysian tsunami'—measuring the impacts of ethnicity and urban development on electoral outcomes. *Asian Journal of Political Science*, 29(1), 42–66. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1814363>
- Pogadaev, V. A. (2023). Anwar Ibrahim, the New Prime Minister of Malaysia. *Asia & Africa Today*, 2, 42–47.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Rus, A. K. A. M., Rosli, M. K. A. M., & Johar, A. (2021). Pilihan Raya Di Persekutuan Tanah Melayu, 1948-1959 Dan Pengenalalan First Past the Post. *Akademika*, 91(3), 63–77.
- Saidin, M. I. S. (2023). Malaysia's crisis of political legitimacy: Understanding the 2020 power transition and 'Sheraton Move' polemics through the 'eyes' of Malaysian political science graduates. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2222572. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2222572>
- Talib, N. S. (2023). Democratic Backsliding in Malaysia: Executive Aggrandizement Under Muhyiddin Yassin's Government. In *Democratic Recession, Autocratization, and Democratic Backlash in Southeast Asia* (pp. 117–138). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9811-9_5
- Tan, D. A. L., & Al-Rikaby, A. B. M. (2022). Aristotelian framing in political discourse: A case study of Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin's exclusive interview with Radio Televisyen Malaysia and the news agency Bernama. In *Adversarial political interviewing: Worldwide perspectives during polarized times* (pp. 109–126). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0576-6_6
- Tayeb, A. (2021). Malaysia in 2020: Fragile coalitional politics and democratic regression. *Asian Survey*, 61(1), 99–105. <https://doi.org/10.1525/AS.2021.61.1.99>
- Vukojević, S. (2023). Government Formation in Multi-level Settings: Evidence from Post-Dayton Bosnia and Herzegovina. *DHS-Društvene i Humanističke Studije: Časopis Filozofskog Fakulteta u Tuzli*, 22(22), 173–196. <https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.1.173>

Copyright holder:

Shofi Dwi Syifa Faujiah, Nurdin (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

